

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, keberhasilan pengelolaan tata pemerintahan yang efektif memerlukan kontribusi SDM yang berkualitas. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian penting dari sumber daya aparatur negara memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu faktor penting yang dapat membantu mewujudkan perilaku PNS sesuai harapan adalah kedisiplinan mereka (Sukoco, 2022, hlm. 105). Dengan tingkat disiplin yang tinggi, pegawai cenderung menaati aturan pedoman yang ada, sehingga tugas dapat dilaksanakan dan tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Untuk memastikan kinerja lembaga berjalan dengan baik, kedisiplinan menjadi faktor utama. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang mendefinisikan “disiplin sebagai kemampuan PNS untuk mematuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”. Ketentuan dalam peraturan ini mencakup kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Pengaturan kedisiplinan PNS bertujuan untuk memastikan PNS yang berkualitas, profesional, dan etis, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*).

Tingkat disiplin pegawai dapat dipengaruhi oleh masalah kehadiran (absensi) atau ketepatan waktu (Syantika, 2022, hlm. 2). Untuk menilai ketepatan waktu pegawai, dapat dilihat dari waktu kehadiran mereka. Manajemen organisasi menggunakan SIM untuk mengawasi kehadiran tersebut. Dalam pemerintahan, SIM memegang peranan penting. Sistem informasi manajemen adalah gabungan dari subsistem yang melibatkan SDM dan teknologi informasi terpadu untuk mengatur, menyimpan, memproses, dan mengakses data, dengan tujuan membantu pengambilan keputusan di suatu lembaga (Halimah, 2023, hlm. 2). Berkaitan dengan manajemen kepegawaian, maka dibentuk sistem informasi untuk memudahkan dalam mengelola data kepegawaian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 pasal 1 (ayat 3) mendefinisikan “Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (SIMPEG-KDN) adalah sistem informasi yang mengelola data dan informasi pegawai secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan teknologi, untuk mendukung proses bisnis dan memberikan informasi yang diperlukan dalam manajemen kepegawaian” (Aprian, 2022, hlm. 4). Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen pegawai juga meningkatkan efisiensi melalui pengintegrasian, pengaturan, dan perlindungan data kepegawaian, serta menyediakan masukan yang diperlukan untuk merencanakan, merekrut, mengevaluasi kinerja, mengembangkan, mensejahterakan, mengendalikan, dan kebijakan terkait pegawai (Sholeha, 2023, hlm. 25). Dengan memanfaatkan SIMPEG ini, instansi pemerintahan dapat meningkatkan tingkat efisiensi kerja dan mendukung proses penentuan dasar keputusan dalam manajemen SDM.

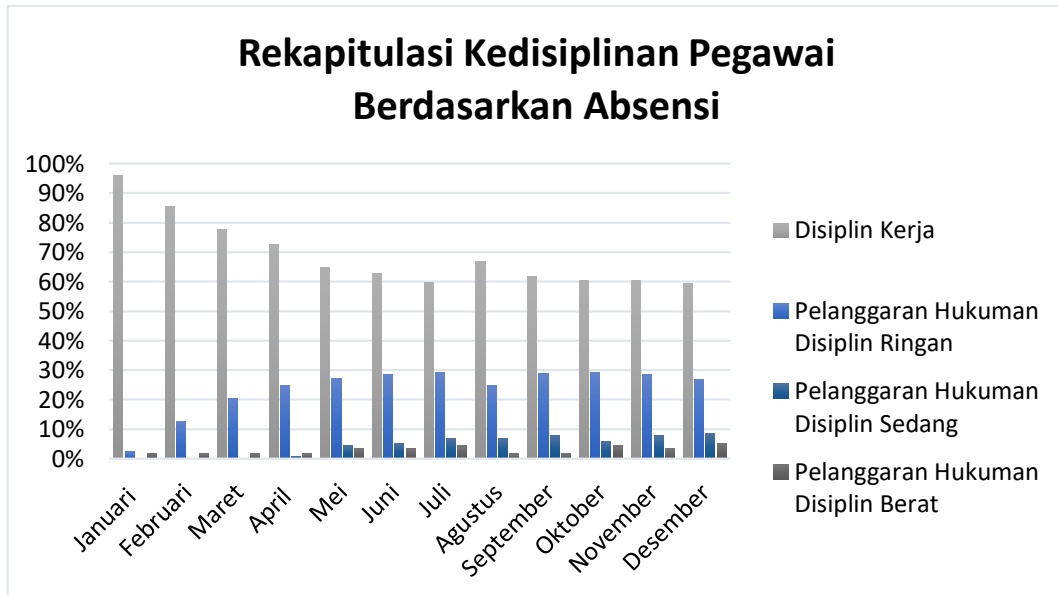
Sistem informasi manajemen kepegawaian adalah perangkat lunak yang menyederhanakan pengolahan data pegawai dan dilengkapi dengan berbagai fitur seperti penilaian kinerja, absensi, izin, cuti, daftar riwayat pekerjaan, pangkat dan jabatan, tunjangan kinerja, riwayat hukuman disiplin, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan absensi, sistem informasi manajemen kepegawaian sangat bermanfaat sebagai penunjang utama untuk mengetahui kehadiran pegawai dan untuk mendukung serta memotivasi pegawai dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Dalam rangka memperkuat manajemen kepegawaian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memberlakukan penggunaan sistem absensi elektronik sebagai pengganti sistem absensi manual. Pergantian sistem absensi berbasis aplikasi ini dilakukan sebagai respons kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data kehadiran, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta mempercepat proses administrasi dan pelaporan.

Selain itu, Surat Menteri PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa “penggunaan sistem absensi elektronik perlu dioptimalkan

untuk mencegah kecurangan atau manipulasi data terkait kehadiran pegawai”. Peraturan ini mengharapkan tiap pegawai PNS untuk menunjukkan disiplin dengan mematuhi kebijakan pemerintah. Penerapan sistem absensi elektronik dianggap penting untuk meningkatkan produktivitas PNS, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan baik, cepat, efektif, dan efisien.

Berdasarkan peraturan diatas, maka Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jawa Barat yang bertugas sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengendalian penduduk dan penyelenggaraan program keluarga berencana memberlakukan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian sebagai bagian dari implementasi disiplin dan tata kelola kepegawaian yang baik serta untuk mendukung visi pemerintah dalam menciptakan kondisi lingkungan kerja yang profesional, efisien, dan transparan. Implementasi penggunaan sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut dimulai pada tahun 2022, dan hingga saat ini masih berlaku. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini, masih terdapat pegawai yang indiscipliner dengan datang terlambat ke kantor. Jam masuk kerja ialah pukul 07.30 WIB sementara pegawai ada yang datang ke kantor pukul 08.30 WIB. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai belum di tingkat optimal. Berikut merupakan data rekapitulasi kedisiplinan pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat berdasarkan absensi pada periode bulan Januari hingga Desember tahun 2023.



Gambar 1. 1 Rekapitulasi Kedisiplinan Pegawai Berdasarkan Absensi

Berdasarkan informasi data di atas, pada bulan Desember tercatat sebagai bulan dengan jumlah pelanggaran hukuman disiplin berat dan pelanggaran hukuman disiplin sedang tertinggi, mencapai 5% dan 9%. Sementara itu, terdapat 29% pegawai yang melanggar hukuman disiplin ringan pada bulan Juli, September, dan Oktober dengan jumlah tertinggi. Pelanggaran hukuman disiplin berdasarkan tingkatan ringan, sedang, berat ini merupakan akumulasi waktu datang terlambat dan pulang cepat yang melebihi ketentuan dan berakibat pada penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan hasil observasi peneliti saat internship, dimana ditemukan beberapa masalah terkait disiplin kerja pegawai, seperti masih ada beberapa pegawai yang datang tidak tepat waktu, pegawai yang lupa absensi, dan masih adanya pegawai yang presensinya di absensikan oleh orang lain. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada pegawai di Bidang Kepegawaian Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dengan menanyakan masalah tentang sistem informasi manajemen kepegawaian yang berhubungan dengan sistem presensi *online* dan beliau mengatakan bahwa sistem presensi *online* tersebut beberapa kali tidak bisa dipergunakan karena *server down*. Sehingga apabila saat pegawai yang datang ke kantor tepat waktu dan akan melakukan presensi, namun aplikasi presensinya tidak bisa dijalankan karena error. Berkenaan dengan ini pegawai yang

hadir pada hari itu menjadi tidak melakukan presensi. Selain itu, kendala dalam penggunaan sistem presensi *online* yang mengandalkan pada ketersediaan jaringan internet. Hal ini terjadi saat pegawai melakukan dinas luar yang lokasinya terpencil dan jaringan/sinyal internet tidak terjangkau. Berikut ini merupakan data pendukung terkait dengan rekapitulasi data ketidakhadiran pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Data Ketidakhadiran Pegawai

Bulan	Jumlah (Orang)
Januari	6
Februari	10
Maret	12
April	13
Mei	14
Juni	16
Juli	10
Agustus	3
September	11
Oktober	7
November	6
Desember	7

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih ada sebagian kecil pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada data dimana pada bulan Juni tercatat sebagai bulan dengan jumlah ketidakhadiran pegawai tertinggi, mencapai 16 orang. Data ini mendukung bahwa masih adanya pelanggaran pada disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, yakni dengan tidak hadir bekerja tanpa keterangan yang jelas.

Pentingnya kedisiplinan dan dampak penerapan SIM kepegawaian terhadap disiplin kerja pegawai PNS diperkuat dengan penelitian sebelumnya oleh Putri Noer Layla Dini Syantika (2022) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Absensi Daring (*Online*) Sebagai Bentuk Pengawasan Digital Terhadap Disiplin Kerja Pegawai PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.” Temuan dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara sistem absensi daring (*online*) dengan disiplin kerja pegawai PNS di Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian korelasi menunjukkan nilai akhir koefisien sebesar 0,599, mencerminkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada di golongan kategori yang sangat baik.

Berdasar pada penjelasan latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh topik mengenai: **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Batasan Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari kemungkinan penyimpangan dan pelebaran topik, memastikan penelitian lebih fokus dan pembahasannya lebih mudah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Peneliti membatasi penelitian ini secara konseptual dan kontekstual yaitu sebagai berikut.

a. Konseptual

Secara konseptual, kajian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari pengaruh penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berhubungan dengan sistem presensi *online* terhadap disiplin kerja pegawai.

b. Kontekstual

Secara kontekstual fokus utama penelitian ini dilakukan kepada pegawai di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada paparan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Disiplin Kerja Pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan kajian penelitian ini adalah untuk bisa mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Terdeskripsikan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.
2. Terdeskripsikan Disiplin Kerja Pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.
3. Teranalisisnya Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan tentang sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kedisiplinan pegawai di suatu lembaga.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Lembaga

Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dasar pertimbangan bagi pihak instansi dalam pengambilan keputusan dalam rangka mengoptimalkan disiplin kerja pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pegawai

Melalui penelitian ini, diharapkan pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan tingkat kedisiplinannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi mencakup gambaran menyeluruh tentang isi dan pembahasan skripsi. Rincian struktur organisasi ini mencakup susunan penulisan tiap bab dan bagian dari bab nya. Adapun struktur organisasi dari laporan penelitian ini meliputi:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Kajian Pustaka.

BAB III : Metode Penelitian.

BAB IV : Temuan Dan Pembahasan.

BAB V : Simpulan, Implikasi Dan Rekomendasi.